

## Menggagas *Collaborative Governance* untuk Pengelolaan Sampah yang Lebih Baik di Desa Bacem, Kabupaten Blitar

Wydha Mustika Maharani<sup>1\*</sup>, Ferida Asih Wiludjeng<sup>2</sup>, Aditya Aji Santoso<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Balitar, Indonesia

E-mail: [wydhamustika7@gmail.com](mailto:wydhamustika7@gmail.com)\*

**Abstract.** *The increase in population without the support of adequate waste management facilities, such as the availability of Temporary Shelters (TPS), has caused the people of Blitar Regency to have the habit of throwing rubbish carelessly in rivers or the habit of burning rubbish. This can cause various negative impacts on the environment and health. This research highlights the importance of the "Bacem Berseri" Waste Bank program to create public awareness in managing waste in a healthier and more sustainable way. The aim of this research is to analyze the implementation of collaborative governance in waste management in Bacem Village, Sutojayan District, Blitar Regency. The research method used was descriptive qualitative, data collection was carried out through in-depth interviews with stakeholders, including Environmental Service officials, village heads, administrators of the "Bacem Berseri" Waste Bank, and local residents. Data analysis techniques include data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that collaboration between parties, including government, society, NGOs and the private sector, can increase the effectiveness of waste management through collaborative governance mechanisms. Key findings include the importance of face-to-face dialogue, facilitative leadership, commitment to process, and shared understanding in increasing community participation and building trust. The Waste Bank system implemented has had a positive impact in reducing waste accumulation and providing financial benefits for residents. However, the challenge lies in efforts to increase public awareness in all RTs to participate actively.*

**Keyword :** *collaborative governance , waste management , waste bank*

**Abstrak.** *Pertambahan jumlah penduduk tanpa didukung dengan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, seperti tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS), menyebabkan masyarakat Kabupaten Blitar memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan di sungai atau kebiasaan membakar sampah. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan. Penelitian ini menyoroti pentingnya program Bank Sampah "Bacem Berseri" untuk mewujudkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan cara yang lebih sehat dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan *collaborative governance* pada pengelolaan sampah di Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Metode penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif deskriptif, pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan pemangku kepentingan, termasuk pejabat Dinas Lingkungan Hidup, kepala desa, pengurus Bank Sampah "Bacem Berseri," dan warga setempat. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar pihak, meliputi pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta, dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah melalui mekanisme *collaborative governance*. Temuan utama meliputi pentingnya dialog tatap muka, kepemimpinan fasilitatif, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta membangun kepercayaan. Sistem Bank Sampah yang diterapkan memberikan dampak positif dalam mengurangi timbunan sampah dan memberikan manfaat finansial bagi warga. Meskipun demikian, tantangan terletak pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat di seluruh RT untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa *collaborative governance* yang terstruktur dan terkoordinasi dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di wilayah yang berkembang, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.*

**Kata Kunci :** *collaborative governance, pengelolaan sampah, bank sampah*

### 1. PENDAHULUAN

Tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah yang sedang berkembang umumnya terus menunjukkan peningkatan yang berbanding lurus dengan laju pembangunan. Peningkatan

jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah ini dapat diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk secara alami atau migrasi dari daerah lain (Ladd, 1992). Peningkatan jumlah penduduk ini menimbulkan banyak konsekuensi yang harus ditanggapi oleh pemerintah setempat secara bijak guna mewujudkan tatanan masyarakat madani (Ehrlich & Holdren, 1971).

Salah satu akibat dari peningkatan laju pembangunan, penambahan penduduk, serta aktivitas dan tingkat sosial ekonomi masyarakat ini telah memicu terjadinya peningkatan jumlah timbunan sampah. Hal ini menjadi semakin kompleks dengan hanya dijalankannya paradigma lama, di mana pengelolaan yang mengandalkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan, yang kesemuanya membutuhkan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu. Jika anggaran tersebut tidak tersedia, maka akan menimbulkan banyak masalah operasional seperti sampah yang tidak terangkut, fasilitas yang tidak memenuhi syarat, cara pengoperasian fasilitas yang tidak mengikuti ketentuan teknis, dan semakin habisnya lahan pembuangan (Nistor & Herman, 2017; Srivastava et al., 2015)

Berlandaskan pada data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pada enam Kecamatan di Kabupaten Blitar mengalami peningkatan dari 355.587 jiwa di tahun 2018 menjadi 384.960 jiwa pada tahun 2022, mencerminkan lonjakan sebesar 8,3%. Seiring dari pertumbuhan populasi penduduk, timbulan sampah yang dihasilkan juga meningkat, mengingat tiap-tiap pribadi manusia menghasilkan kisaran 0,5-1 kg sampah tiap harinya. Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti kebutuhan akan sumber daya dan layanan, termasuk pengelolaan limbah (Orimoogunje et al., 2011). Semakin banyak orang yang tinggal dan beraktivitas di suatu wilayah, semakin besar pula kebutuhan terhadap metode penanganan sampah yang baik. Jika sarana dan prasarana teruntuk pengelolaan sampah tidak dipersiapkan dengan baik, maka jumlah sampah yang terus meningkat dapat menjadi masalah besar. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengelolaan sampah yang baik diawali dari sumbernya sampai pada proses akhir agar dapat termanajemen dengan baik (Singh et al., 2014).

Sesuai dengan amanat Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, gambaran dari model pengelolaan sampah diinginkan tidak saja yakin akan pola kumpul-angkut dan buang akan tetapi bergeser pada pola penyusutan dan pengolahan sampah mulai dari sumbernya supaya memberikan keuntungan secara ekonomi, kesehatan untuk masyarakat dan keamanan untuk lingkungan serta bisa menjadikan perubahan perilaku dari masyarakat. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah mempunyai

tugas memastikan terlaksananya kegiatan pengelolaan sampah dengan baik dan konsep cara pandang lingkungan sesuai dengan tujuan yaitu adanya peningkatan kesehatan dari masyarakat dan mutu lingkungan serta membentuk sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat dan berdaya guna.

Setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berlaku, TPA yang sebelumnya mempergunakan sistem open dumping harus dirubah menjadi sanitary landfill. Sistem sanitary landfill merupakan cara yang modern dan efektif di mana sampah ditimbun di cekungan besar dan ditutup dengan tanah atau material lainnya. Sebelumnya melakukan penimbunan sampah, kemudian galangan tersebut diberi lapisan kedap dari bahan geomembrane bagian dasarnya dan dindingnya untuk mengurangi pencemaran air, tanah, dan udara di sekitarnya.

Sebagai studi perbandingan, TPA Kota Blitar telah menggunakan sistem Sanitary Landfill dan berhasil mengelola sekitar 75% sampah, dari penerimaan 22.367 ton per tahunnya dan mampu mengelola 16.775 ton. Sebaliknya, TPA Tegalasri di Kabupaten Blitar masih memakai sistem Control Landfill dan menghadapi peningkatan volume sampah yang signifikan setiap tahun. Hanya sekitar 40% dari 76.293 ton sampah per tahun yang dapat terkelola, sisanya ditumpuk begitu saja. Selain itu, sarana dan prasarana di TPA Tegalasri juga masih kurang mencukupi standar. Hal-hal yang banyak untuk perlu dicermati, contohnya minimnya unit alat berat, tidak terdapatnya jembatan timbang, dan kolam IPAL yang belum beroperasi secara optimal karena jumlah sampah tertumpuk di pipa IPAL (Purnamasari & Sitogasa, 2024). Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pengelolaan sampah antara Kota Blitar dan Kabupaten Blitar.

Berbagai masalah tersebut pada akhirnya akan menyebabkan rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan serta kurangnya proteksi terhadap lingkungan dalam pengelolaan sampah. Jika tidak sesegera mungkin diperbaiki, hal ini dapat merusak rasa percaya dan kerjasama dari masyarakat yang sungguh-sungguh penting untuk layanan kepada masyarakat yang baik (Olukanni et al., 2020; Singh et al., 2014). Untuk mengelola sampah yang semakin banyak dan kompleks, diperlukan sistem yang mencakup lembaga dengan peraturan, pendanaan, peralatan yang memadai, dan kesadaran masyarakat yang tinggi (Han et al., 2019; Kumar et al., 2017).

Berdasarkan permasalahan di atas, penting untuk menggagas model Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar. Pendekatan ini akan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah desa, masyarakat, LSM, dan pihak swasta, didalam merancang dan menerapkan strategi pengelolaan sampah menjadi efektif dan

berkelanjutan.

Collaborative governance hadir sebagai solusi efektif, baik dirancang maupun tidak, untuk menangani berbagai masalah kebijakan publik yang melampaui batas-batas birokrasi pemerintahan (Emerson et al., 2012). Munculnya tata kelola kolaboratif dapat disebabkan oleh banyak faktor, termasuk semakin banyaknya dan kompleksnya masalah publik, serta konteks di mana masalah-masalah tersebut harus diselesaikan dan harus melibatkan banyak pemangku kepentingan (Emerson & Nabatchi, 2015). Keterlibatan masyarakat juga berperan penting dalam kolaborasi untuk mencapai perubahan perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai keberlanjutan (Gillgren et al., 2019; Inácio & Umgiesser, 2019).

Banyak penelitian yang mengkaji collaborative governance dalam pengelolaan sampah sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Amelinda & Kriswibowo (2021) menyebutkan bahwa pengelolaan sampah terpadu di TPST Tambakrejo, Sidoarjo, menghadapi berbagai kendala yang harus teratasi dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi. Peningkatan anggaran, partisipasi masyarakat, infrastruktur, koordinasi antar pihak, kapasitas sumber daya manusia, dan teknologi pengolahan yaitu aspek-aspek kunci yang perlu dicermati untuk mengatasi masalah tersebut.

Sedangkan temuan penelitian Ain et al., (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan sampah menjadi hal yang mendesak karena lebih dari 400 ribu ton sampah dihasilkan setiap tahunnya dengan hanya sepuluh persen yang didaur ulang dan sisanya berakhir di lautan. Meskipun kerangka hukum dan tata kelola kolaboratif telah diterapkan, partisipasi dan kepatuhan masyarakat yang kurang maksimal. Perihal tersebut dikarenakan belum terbentuknya tujuan bersama yang jelas antara semua aktor yang terlibat.

Keunikan dari penelitian ini berada di tempat penelitian yang terletak di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, yang memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana model collaborative governance dapat diterapkan di tingkat desa. Lokasi ini dipilih karena adanya strategi bank sampah yang telah diimplementasikan sebagai upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Emerson et al., (2012) sebagai kerangka analisis utama, yang membantu dalam memahami proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan tujuan bersama kegiatan pengelolaan sampah. Berdasarkan empirical gap di atas maka pada rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah proses dari collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar?

## 2. METODE

Pada penelitian ini mempergunakan penelitian kualitatif. Pendapat Creswell (2015), pilihan strategi atau metode penelitian harus sama dengan tujuan dari penelitian itu. Tujuan penelitian sebenarnya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Alasan dari peneliti untuk memutuskan pilihan pada metode kualitatif yaitu ingin menggambarkan situasi di lokasi penelitian dengan lebih rinci, jelas, serta mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan situasi atau kejadian sampai di mana data yang terkumpul dapat digambarkan untuk mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal. Fokus penelitian ditetapkan berdasarkan rumusan masalah berikut ini : 1) pergerakan prinsip bersama; 2) motivasi bersama; 3) kapasitas melaksanakan tindakan bersama-sama; 4) outcome collaborative governance. Peneliti melakukan wawancara dengan Penanggungjawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, Kepala Desa Bacem, Pengurus Bank Sampah “Bacem Berseri”, dan masyarakat Desa Bacem. Analisis data dilakukan memakai model interaktif dari Miles et al., (2014), yang terdiri tiga langkah utama: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data melibatkan seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi data yang dikumpulkan. Penyajian data memungkinkan informasi diatur dengan rapi, membuatnya lebih mudah untuk diinterpretasikan. Kesimpulan awal yang diambil bersifat sementara dan dapat disesuaikan berdasarkan bukti-bukti baru yang muncul selama proses pengumpulan data selanjutnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi adalah istilah yang menggambarkan cara dua pihak atau lebih untuk bekerja bersama-sama dalam tercapainya tujuan bersama. Dalam konteks ini, kolaborasi melibatkan proses kerja internal dan kerja sama antar pihak untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut adalah deskripsi hasil pembahasan mengenai proses collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar:

### **Kondisi Awal**

Kondisi awal merupakan fase penting yang mendeskripsikan situasi sebelum terjadinya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Menurut Ansell, C. and Gash (2008), kondisi awal ini dapat terpengaruh oleh tiga faktor utama: ketidakseimbangan sumber-sumber daya dan pengetahuan diantara pelaku-pelaku kolaborasi, adanya insentif (motivasi) yang jelas,

serta hambatan bagi para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi. Dalam konteks pengelolaan sampah di Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, kondisi awal ini menjadi pendorong utama terbentuknya pengelolaan sampah yang lebih baik.

Di Kecamatan Sutojayan, warga mengeluhkan kondisi selokan yang terletak di depan kantor kecamatan. Selokan tersebut dipenuhi sampah yang menyebabkan aliran air tersumbat dan menimbulkan bau tidak sedap. Kondisi ini sangat mengganggu kenyamanan warga dan aktivitas di sekitar kantor kecamatan. Sampah yang menumpuk di selokan ini terdiri dari berbagai jenis limbah, termasuk sampah rumah tangga dan plastik. Kepala Desa Bacem menyampaikan bahwa volume sampah di Desa Bacem terus mengalami peningkatan bersamaan dengan peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan di bagian infrastruktur. Tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius, termasuk pencemaran air dan tanah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan sejumlah warga Desa Bacem yang menyatakan bahwa sampah sering kali menumpuk di sekitar rumah warga karena kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Bau tidak sedap dan risiko penyebaran penyakit menjadi masalah utama yang dihadapi oleh warga setiap hari (Tio, 2022).

Seorang aktivis lingkungan Kecamatan Sutojayan juga membenarkan hal tersebut dengan memberikan pernyataannya bahwa sampah plastik dan sampah non-organik lainnya sering kali tidak dikelola dengan baik dan akhirnya mencemari sungai dan tanah di sekitar desa. Warga desa sangat membutuhkan solusi yang lebih efektif untuk mengelola sampah ini agar tidak merusak lingkungan. Menanggapi hal tersebut, Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar menyatakan bahwa ia menerima banyak keluhan dari masyarakat tentang masalah sampah di Kecamatan Sutojayan.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada sudah hampir mencapai kapasitas maksimal, dan metode pengelolaan sampah tradisional tidak lagi efektif untuk mengatasi volume sampah yang semakin besar. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan dalam mengelola sampah. Warga sering kali tidak memiliki akses atau pengetahuan yang memadai tentang cara pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, fasilitas pengelolaan sampah yang ada tidak mencukupi untuk menangani volume sampah yang berturut-turut mengalami peningkatan sejalan dengan pertambahan penduduk dan infrastruktur yang dibangun. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan penanganan sampah yang tidak optimal dan berdampak negatif pada lingkungan sekitar.



**Gambar 1.** Fasilitas Penunjang Bank Sampah

Sumber: Data Sekunder, 2024

Kondisi awal di Kecamatan Sutojayan menunjukkan bahwa masalah sampah telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan, serta kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, menyebabkan penanganan sampah yang tidak optimal. Hal ini berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan warga. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih efektif dan kolaboratif untuk mengelola sampah di daerah ini. Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi awal, diharapkan kolaborasi yang lebih baik diantara masyarakat, pemerintah, serta pihak swasta dapat tercipta untuk menghasilkan lingkungan menjadi semakin bersih dan sehat.

### **Kepemimpinan Fasilitatif**

Kepemimpinan fasilitatif dalam proses collaborative governance memainkan peran penting dengan beberapa fungsi utama. Pemimpin fasilitatif berupaya membangun kepercayaan melalui transparansi dan konsistensi, sehingga pemangku kepentingan lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dan bekerja sama. Mereka memastikan semua suara didengar dan diperhatikan dengan mengatur dan memoderasi pertemuan, menciptakan dialog yang konstruktif untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan membangun kesepakatan. Selain itu, pemimpin fasilitatif mengelola konflik dengan cara yang konstruktif menggunakan teknik mediasi dan negosiasi untuk mendapatkan penyelesaian yang dapat diterima seluruh pihak. Mereka juga membantu meningkatkan kapasitas kolaborasi para pemangku kepentingan dengan menyediakan pelatihan, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan, serta mengatasi hambatan yang menghalangi partisipasi penuh. Akhirnya, pemimpin fasilitatif memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif,

memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan konsensus dan mempertimbangkan perspektif serta kepentingan semua pihak (Ansell, C. and Gash, 2008).

Kepemimpinan fasilitatif dalam program bank sampah di Desa Bacem berperan penting dalam membangun kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan. Salah satu langkah utama yang diambil adalah dengan memilih ketua program yang memiliki pemikiran progresif dan mampu mengelola organisasi secara jelas dan terstruktur. Pemilihan ketua ini dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan berbagai aspek demi menciptakan alur organisasi yang jelas arah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua elemen. Dengan kepemimpinan yang transparan dan konsisten, masyarakat merasa yakin dan lebih bersemangat untuk berpartisipasi aktif dalam program ini.

Selain membangun kepercayaan, kepemimpinan fasilitatif juga berfokus pada memfasilitasi dialog dan komunikasi yang efektif. Menurut seorang warga, kepemimpinan yang diterapkan dalam program ini sangat terstruktur dan memiliki pemikiran progresif, sehingga ketua program dapat dipertanggungjawabkan oleh semua elemen masyarakat. Musyawarah rutin yang dilakukan memungkinkan masyarakat untuk memahami prosedur bank sampah dengan lebih baik dan menyelesaikan konflik yang mungkin muncul. Bapak Santoso, seorang warga, merasakan terbantuan keberadaan dari musyawarah ini oleh sebab memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bank sampah. Untuk membangun kapasitas kolaborasi, program ini juga menyediakan sosialisasi rutin yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, membantu masyarakat memahami dan terlibat aktif dalam kegiatan bank sampah. Kesimpulannya, kebijakan program bank sampah diatur dengan sangat baik melalui sosialisasi rutin, memastikan semua elemen masyarakat memahami dan mendukung program yang dijalankan.

### **Desain Kelembagaan**

Menurut teori Ansell dan Gash (2007), desain kelembagaan dalam collaborative governance merujuk pada aturan dasar, prosedur, dan implementasi yang transparan untuk mendukung proses kolaboratif. Desain kelembagaan yang baik mencakup beberapa elemen kunci, seperti aturan dasar dan prosedur yang berfungsi sebagai pedoman kolaborasi, termasuk mekanisme keterlibatan pemangku kepentingan, proses pengambilan keputusan, dan cara memastikan partisipasi yang adil dan merata di antara semua pihak. Selain itu, transparansi dalam implementasi adalah hal yang sangat penting, memastikan semua proses dan keputusan dapat diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Transparansi membantu mengurangi ketidakpercayaan dan meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan langkah-

langkah, keputusan, dan hasil kolaborasi secara terbuka. Dengan memastikan adanya aturan dasar dan prosedur yang jelas serta transparansi dalam implementasi, desain kelembagaan dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk terlibat secara efektif dan setara, sehingga mendukung tercapainya tujuan kolaborasi secara efektif dan efisien.

Dalam pengelolaan sampah di Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, aturan dasar dan prosedur telah diatur dengan jelas untuk mendukung proses kolaboratif yang efektif. Dalam hal ini pihak desa telah melakukan penyusunan struktur yang jelas yang mana telah ditetapkan setiap pengurus yang bergerak di bidang strukturnya masing-masing, dari setiap petugas ini kita harapkan mampu melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing demi terciptanya tujuan bersama dalam organisasi yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Bacem No. 22 Tahun 2020 tentang Pengurus Bank Sampah “Bacem Berseri” Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Ini menunjukkan bahwa desa telah berusaha keras untuk menjamin bahwa tiap-tiap anggota tim mengerti peran dan tanggung jawabnya, yang merupakan elemen yang fundamental dalam desain kelembagaan yang baik.

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Warga Desa Bacem menyampaikan bahwa pihak desa telah melakukan penyusunan struktur yang jelas yang mana telah ditetapkan setiap petugas yang bergerak di bidangnya masing-masing, dari setiap petugas ini menurut saya sudah mampu melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing demi terciptanya tujuan bersama dalam organisasi bank sampah ini. Pernyataan tersebut memperkuat validitas bahwa struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik telah diterapkan, dan setiap pengurus menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

## **Proses Kolaboratif**

### **1) Dialog Tatap Muka**

Pentingnya dialog tatap muka pada model collaborative governance dari Ansell & Gash telah diakui sebagai salah satu faktor penting untuk membangun kepercayaan, komitmen, serta pemahaman bersama di antara para pemangku kepentingan. Proses kolaboratif yang sukses sangat bergantung pada komunikasi tatap muka, yang mampu mendorong pembentukan kepercayaan dan komitmen bersama, serta mengarah pada hasil yang lebih baik dalam pengelolaan isu publik.

Dalam konteks sosialisasi program pengelolaan sampah, kegiatan pertemuan rutin

seperti rapat RT/RW, PKK, dan kelompok masyarakat merupakan wujud dari dialog tatap muka, yang sesuai dengan temuan Ansell & Gash bahwa komunikasi langsung sangat efektif dalam membangun kolaborasi yang kuat (Yani et al., 2021).

Dialog tatap muka dalam pengelolaan sampah berbasis collaborative governance memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Musyawarah rutin yang dilakukan memberikan kesempatan bagi warga dan pihak desa untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta menyampaikan keluhan terkait program pengelolaan sampah. Lewat dialog ini, masyarakat lebih memahami konsep seperti bank sampah dan bagaimana cara kerjanya.



**Gambar 2.** Musyawarah Bank Sampah

Sumber: Data Sekunder, 2024

Selain itu, pemerintah desa juga menggunakan pertemuan ini untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan program agar berjalan lebih baik. Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap program semakin kuat, dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan program pun meningkat. Dialog tatap muka ini terbukti menjadi elemen penting dalam membangun kerja sama yang efektif antara berbagai pihak.

Materi-materi yang dapat disampaikan dalam kegiatan sosialisasi terkait kondisi sosial di Desa Bacem Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

- 1) Selama ini banyak yang masyarakat yang membuang sampah mereka di kolong rumah mereka yang berupa rawa (genangan air) sehingga mengganggu keindahan dan kesehatan masyarakat sehingga perlu di sosialisasikan tentang bahaya membuang sampah sembarangan dan berbagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Mengelola sampah organik menjadi kompos. Sampah berupa tidak organik yang masih

dapat didaur ulang kemudian dikumpulkan di masing-masing keluarga, RT, Dusun, selanjutnya dijual pada pengepul, dari hasil penjualan tersebut dapat membantu kebutuhan sosial bersama di lingkungan tempat tersebut.

- 2) Memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah di kolong rumah (rawa), sanksi yang diberikan misal membeli pot dan tanaman untuk ditanam di area kampung.
- 3) Materi tentang bahaya membakar sampah plastik karena asapnya bisa merusak lapisan ozon yang bisa berpengaruh terhadap temperatur udara dan perubahan cuaca dan bahaya membakar sampah sembarangan juga akan berakibat kebakaran lahan dan bangunan. Sampah organik (sisa makanan, daun-daunan, sisa sayuran, dan lain-lain yang sejenis, dapat diolah jadi humus. Humus tersebut dapat diolah menjadi pupuk organik yang dapat dijual kembali atau digunakan secara mandiri untuk memupuk tanaman hias maupun tanaman selainnya.
- 4) Mensosialisasikan penyakit yang dapat timbul karena membuang sampah disembarang tempat. Sosialisasi tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat.



**Gambar 3.** Sosialisasi Pembinaan dan Pelatihan Bank Sampah

Sumber: Data Sekunder, 2024

Materi sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat bertujuan untuk mengetahui bahaya membuang sampah dengan seenaknya sendiri yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan serta kesehatan. Edukasi juga perlu diberikan tentang cara mengelola sampah organik menjadi kompos, serta mendaur ulang sampah non-organik agar bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, sanksi seperti menanam tanaman bisa diterapkan untuk warga yang

melanggar aturan. Masyarakat juga perlu memahami bahaya membakar sampah plastik, karena asapnya merusak lingkungan dan bisa menyebabkan kebakaran. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat lebih aktif dalam mengelola sampah dengan baik.

## **2) Membangun Kepercayaan**

Membangun kepercayaan dalam proses kolaboratif sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan sampah di Desa Bacem. Salah satu upaya utamanya adalah memastikan transparansi di setiap tahap kolaborasi. Transparansi ini berarti bahwa pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta secara terbuka berbagi informasi mengenai kegiatan, tujuan, dan hasil yang dicapai. Keterbukaan ini memungkinkan setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya, yang pada akhirnya memperbanyak rasa loyalitas dan mengoptimalkan kerja sama.

Pemerintah desa telah membuat langkah konkret dengan membentuk struktur pengelolaan sampah yang progresif. Mereka mengoordinasikan ketua RT untuk menyebarkan informasi tentang jadwal pengumpulan sampah atau nabung sampah di bank sampah desa. Setiap Minggu, sampah dikumpulkan oleh petugas yang ditunjuk. Kejelasan dalam pelaksanaan ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat, seperti yang diungkapkan seorang warga: “Saya memiliki kepercayaan tinggi terhadap program ini karena pihak desa membuat struktur yang jelas dan progresif.”

Di awal kolaborasi, kepercayaan sering kali masih rendah di antara para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif melalui musyawarah desa dan pertemuan bank sampah. Pertemuan rutin ini menjadi wadah bagi semua pihak untuk berdialog secara langsung, menunjukkan niat baik, dan menetapkan tujuan bersama. Dialog ini membantu membangun fondasi kepercayaan yang lebih kuat, terutama ketika masyarakat melihat komitmen berkelanjutan dari para pemimpin dalam menjalankan program.

Partisipasi aktif masyarakat juga berperan penting dalam membangun kepercayaan. Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan seperti pelatihan daur ulang dan pemilahan sampah. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka memiliki peran dalam pengelolaan sampah. Rasa memiliki dan tanggung jawab ini memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan pihak-pihak lain yang terlibat.

Selain itu, membangun kepercayaan memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak. Setiap aktor harus siap untuk terlibat dalam kolaborasi ini secara berkelanjutan, tidak hanya di awal tetapi juga dalam jangka panjang. Komitmen ini terlihat melalui kehadiran rutin dalam pertemuan dan kontribusi nyata dalam kegiatan yang mendukung tujuan bersama.

Dengan cara ini, kepercayaan yang terbentuk di awal dapat terus dipertahankan dan diperkuat, menciptakan dasar yang kokoh untuk pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Desa Bacem.

### 3) Komitmen Terhadap Proses

Komitmen terhadap proses merupakan unsur penting dalam kolaborasi, terutama dalam pengelolaan sampah di Desa Bacem. Menurut Ansell dan Gash (2008), komitmen ini terbentuk melalui rasa saling percaya, yang kemudian memengaruhi terciptanya pemahaman bersama antar pelaku. Dalam konteks pengelolaan sampah di Desa Bacem, komitmen ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Komitmen terhadap proses mengacu pada kesepakatan semua pihak yang terlibat untuk menjalani langkah-langkah yang telah ditetapkan demi mencapai hasil yang diinginkan. Dalam praktiknya, komitmen ini tampak dari program bank sampah yang berjalan dengan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Banyak warga yang terlibat aktif, menyisihkan sampah atau barang bekas untuk ditabung di bank sampah, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan.



**Gambar 4.** Pengelolaan Bank Sampah

Sumber: Data Sekunder, 2024

Namun, masih ada kendala yang dihadapi, seperti kesadaran masyarakat yang belum merata tentang pentingnya pengelolaan sampah. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa warga, beberapa RT belum sepenuhnya bergabung dalam program bank sampah. Meskipun demikian, banyak juga warga yang sudah menyadari manfaat program ini dan berpartisipasi

dengan aktif. Kendala-kendala tersebut perlu diatasi agar komitmen semua pihak dalam program bank sampah dapat ditingkatkan. Dengan begitu, program ini dapat berjalan lebih optimal dan merata di semua kalangan masyarakat, sehingga pengelolaan sampah di Desa Bacem bisa lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi warga.

#### **4) Pemahaman Bersama**

Pemahaman bersama merupakan elemen kunci dalam proses kolaboratif, yang mengacu pada kesamaan pandangan dan persepsi di antara para pemangku kepentingan tentang tujuan, visi, dan cara kerja bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan (Ansell & Gash, 2007). Dalam penelitian ini, para pelaku saling berkolaborasi untuk memiliki pemahaman yang sama untuk mengurangi timbunan sampah dengan melakukan pengelolaan sampah yang efektif. Pemahaman bersama ini mencakup kesepakatan mengenai masalah yang akan diatasi, strategi yang dipilih, serta pembagian peran dan tanggung jawab antara para pihak yang terlibat. Misalnya, apakah program bank sampah ini akan menciptakan lapangan kerja lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, atau meningkatkan kesadaran lingkungan. Semua pihak harus sepakat mengenai tujuan akhir dari program tersebut.

Mengubah pemahaman dan pola pikir masyarakat memerlukan kerjasama dan komunikasi yang solid antara Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar) dan masyarakat yang ikut serta pada pengelolaan Bank Sampah Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan. Tim pengelola yang terdiri dari penasehat, ketua, bendahara, sekretaris, serta berbagai seksi seperti seksi penimbangan, pencatatan, perlengkapan, dan humas telah dibentuk dengan struktur yang jelas, dan tugas masing-masing anggota ditetapkan agar tujuan bersama dalam Program Bacem Berseri dapat tercapai.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman di kalangan warga tentang manfaat ekonomi dari sampah yang dapat diolah dan ditabung. Seperti yang disampaikan oleh beberapa warga, masih ada RT yang enggan berpartisipasi dalam program bank sampah, karena mereka belum menyadari manfaatnya. Sebagian masyarakat yang sudah ikut serta mengakui bahwa bank sampah memberikan penghasilan tambahan dengan menabung sampah atau barang bekas setiap hari.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Seksi Humas Bacem Berseri bahwa program ini dirasa belum optimal karena belum semua RT berpartisipasi. Tetapi, beliau juga mencatat bahwa partisipasi dari sebagian warga menunjukkan bahwa program bank sampah memiliki potensi untuk berkembang, asalkan pemahaman masyarakat tentang keuntungan ekonomi dan manfaat lingkungannya dapat terus ditingkatkan. Secara keseluruhan, meski sudah ada

kemajuan, upaya melibatkan seluruh komunitas untuk mendukung pengelolaan sampah secara maksimal masih membutuhkan kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak.

### **5) Hasil Antara**

Hasil dari proses kolaborasi dengan berbagai mitra kepentingan didalam pengelolaan sampah di Desa Bacem telah memperlihatkan dampak positif yang nyata melalui keberadaan sistem Bank Sampah. Bank Sampah ini mampu mengolah timbulan sampah sehingga tidak hanya tertangani dengan baik, tetapi juga memberikan manfaat finansial bagi masyarakat. Sistem ini dirancang untuk menjadikan guna dari sampah rumah tangga, mengubahnya menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis (Solihin, 2018). Meskipun masih ada beberapa keluhan masyarakat terkait keterlambatan pengangkutan sampah, pengelolaan sampah secara keseluruhan sudah cukup optimal, terbukti dari jumlah residu sampah yang sesuai target dan pemenuhan sarana serta prasarana yang dibutuhkan. Selain itu dibuktikan juga ada beberapa RT yang warganya masih belum mau bergabung dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui program bank sampah.

Pada setiap prosesnya adalah pergerakan prinsip bersama menghasilkan adanya musyawarah rutin, motivasi bersama dengan membuat struktur organisasi yang jelas dan progresif demi meningkatkan rasa kepercayaan di seluruh elemen masyarakat, kapasitas melakukan tindakan bersama menghasilkan pengelolaan kepemimpinan yang progresif dan dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh elemen yang berkaitan dengan kegiatan ini. Kolaborasi intensif dengan para stakeholder ini juga mendorong terjadinya koordinasi dan musyawarah secara berkala, yang telah meningkatkan motivasi para kolaborator dan membangun kepercayaan di antara mereka. Dengan produktivitas yang semakin meningkat dan stabilitas yang tercipta, para pemangku kepentingan semakin yakin pada efektivitas program ini. Proses kolaboratif yang berjalan efektif ini membawa dampak stabilitas dan produktivitas jangka panjang, memberikan warga manfaat langsung dari pengelolaan sampah serta menjaga kebersihan lingkungan di Desa Bacem.

## **4. KESIMPULAN**

Kolaborasi di antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kolaborasi ini melibatkan proses kerja internal dan komunikasi antar pihak yang efektif, yang mendorong tercapainya tujuan bersama yaitu pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Fase awal kolaborasi menunjukkan adanya ketidakseimbangan sumber daya

dan pengetahuan, serta kendala fasilitas, yang berdampak pada penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan. Dengan adanya kepemimpinan fasilitatif yang transparan dan desain kelembagaan yang terstruktur, program Bank Sampah berhasil mengatasi beberapa masalah tersebut melalui pengelolaan sampah yang lebih optimal dan membagi-bagi tugas yang jelas.

Proses kolaboratif yang diterapkan, seperti dialog tatap muka, dibangunnya kepercayaan, keterlibatan terhadap proses, serta apresiasi bersama, membantu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Dialog rutin dan komunikasi terbuka memperkuat rasa saling percaya, sehingga masyarakat lebih bersemangat untuk ikut serta. Meskipun masih ada beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran di beberapa RT, upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terus dilakukan. Hasil dari kolaborasi ini adalah terbentuknya Bank Sampah yang memberikan manfaat finansial, mengurangi timbulan sampah, dan membantu membentuk lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warga.

## 5. REFERENSI

- Ain, K. Q., Nasri, M. A., Alamsyah, M. N., Pratama, M. D. R., & Kurniawan, T. (2021). Collaborative governance in managing plastic waste in Bali. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 905(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/905/1/012115>
- Amelinda, A. D., & Kriswibowo, A. (2021). COLLABORATIVE GOVERNANCE IN WASTE MANAGEMENT (Study In The Integrated Waste Management Site Of Tambakrejo Area, Sidoarjo Regency). *Dia*, 19(1). <https://doi.org/10.30996/dia.v15i2.4842>
- Ansell, C. and Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4).
- Ehrlich, P. R., & Holdren, J. P. (1971). Impact of population growth. *Science*, 171(3977). <https://doi.org/10.1126/science.171.3977.1212>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. In *Collaborative Governance Regimes*. <https://doi.org/10.1111/padm.12278>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1). <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Gillgren, C., Støttrup, J. G., Schumacher, J., & Dinesen, G. E. (2019). Working together: collaborative decision making for sustainable Integrated Coastal Management (ICM). *Journal of Coastal Conservation*, 23(5). <https://doi.org/10.1007/s11852-018-0631-z>
- Han, Z., Zeng, D., Li, Q., Cheng, C., Shi, G., & Mou, Z. (2019). Public willingness to pay and participate in domestic waste management in rural areas of China. *Resources, Conservation and Recycling*, 140. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.09.018>
- Inácio, M., & Umgieser, G. (2019). A systems approach framework for coastal management

- and its application in practice. In *Journal of Coastal Conservation* (Vol. 23, Issue 5). <https://doi.org/10.1007/s11852-019-00709-8>
- Kumar, S., Smith, S. R., Fowler, G., Velis, C., Kumar, S. J., Arya, S., Rena, Kumar, R., & Cheeseman, C. (2017). Challenges and opportunities associated with waste management in India. In *Royal Society Open Science* (Vol. 4, Issue 3). <https://doi.org/10.1098/rsos.160764>
- Ladd, H. F. (1992). Population growth, density and the costs of providing public services. *Urban Studies*, 29(2). <https://doi.org/10.1080/00420989220080321>
- Nistor, C., & Herman, R. (2017). The sustainable management in the e-waste and municipal solid waste sectors. *Manager*, 26.
- Olukanni, D. O., Pius-Imue, F. B., & Joseph, S. O. (2020). Public perception of solid waste management practices in Nigeria: Ogun state experience. *Recycling*, 5(2). <https://doi.org/10.3390/recycling5020008>
- Orimoogunje, O., Adegboyega, S., Banjo, O., & Funmilayo, O. (2011). Population growth: Implications for environmental sustainability. *IFE Psychologia*, 19(1). <https://doi.org/10.4314/ifep.v19i1.64574>
- Purnamasari, S. I., & Sitogasa, P. S. A. (2024). Analisis Sistem Pengelolaan Sampah di TPA Tegalsari Kabupaten Blitar. *Envirotek : Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 16(1), 25–30.
- Singh, J., Laurenti, R., Sinha, R., & Frostell, B. (2014). Progress and challenges to the global waste management system. *Waste Management and Research*, 32(9). <https://doi.org/10.1177/0734242X14537868>
- Solihin, muhtar mochamad, Pudji Muljono and Dwi Sadono. 2018. Sustainable Waste Management Through Trash Bank In Ragajaya Village, Bogor Regency, West Java Province, Indonesia. *International journal of progressive sciences and technologies (IJPSAT)* Vol 9 No 2 pp 190-198
- Srivastava, V., Ismail, S. A., Singh, P., & Singh, R. P. (2015). Urban solid waste management in the developing world with emphasis on India: challenges and opportunities. In *Reviews in Environmental Science and Biotechnology* (Vol. 14, Issue 2). <https://doi.org/10.1007/s11157-014-9352-4>
- Tio. (2022). *Warga Keluhkan Sampah di Selokan Depan Kantor Kecamatan Sutojayan Blitar*. *Jatim Hari Ini*. <https://www.jatimhariini.co.id/daerah/pr-8826121752/warga-keluhkan-sampah-di-selokan-depan-kantor-kecamatan-sutojayan-blitar>
- Yani, A., Saputra, J., Muhammad, Z., Aiyub, Nazaruddin, Aisyah, T., Musfira, C. L., Petege, O., Rahmat, & Miska, L. (2021). *Collaborative Governance in the Management of Natural Tourism to Increase the Village's Original Income in the Sawang Sub-district*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210125.055>